

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**PENERAPAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
: SE-003/A/JA/05/2002 TENTANG PERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS KHUSUS DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi

Persyaratan Guna Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

MUHAMMAD AZIZ RIDWAN

B1A010084

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aziz Ridwan
NPM : B1A010084
Jurusan/Prog. Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : “Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan
Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus
Khusus Di Kota Bengkulu”

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil plagiat maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bengkulu, Februari 2014



MUHAMMAD AZIZ RIDWAN

NPM. B1A010084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- δ Rintangan apapun akan bisa kamu lewati jika kamu memiliki keyakinan kamu kuat karena kamu yakin, kamu lemah karena kamu ragu.
- δ Keberhasilan dalam hidup merupakan kombinasi dari niat, ikhlas, kerja keras, doa serta tawakal, sedangkan keberuntungan hanya nilai tambahan.
- δ Pengenalan diri selalu berdimensi pada waktu, masa lampau adalah sejarah dan kenangan, masa kini adalah realita dan kenyataan yang hadir, masa depan adalah tantangan dan harapan (*Francis Bacon*).
- δ Maka apabila kamu telah selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap (*Qs. Al-Insyariah : 6-8*)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- δ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu ada untukku dalam keadaan apapun dan yang selalu mendoakan serta memotivasi setiap kemana kakiku melangkah untuk mencapai suatu tujuan mulia dan semua ini aku persembahkan untukmu.
- δ Adekku serta saudaraku yang selalu melengkapi kebahagiaan dan keharmonisan didalam keluarga.
- δ Almamaterku yang selalu mengantarkanku hingga aku menjadi seperti saat ini.
- δ Skripsi ini juga aku persembahkan untuk Indonesiaku.

KATA PENGANTAR

Alhamdullillahhirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas karunia dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “PENERAPAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SE-003/A/JA/05/2002 TENTANG PERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS KHUSUS DI KOTA BENGKULU”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Ibu Lidia Br. Karo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan, masukan, bantuan pemikiran dan motivasi yang sangat besar dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih bagus hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, memberikan arahan dengan kesabaran, bimbingan, serta inspirasi untuk menjadi lebih bagus hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Antory Royan A, S.H., M.Hum, selaku pembahas sekaligus Ketua Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H, selaku pembahas sekaligus Sekertaris Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta kritik yang membangaun untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh responden di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang telah banyak sekali membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
8. Ibu Susi Rahmadhani, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dari pertama kali masuk kuliah sampai telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Bengkulu.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan semasa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah membantu kelancaran studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
11. Nurheni Syahputri, yang selalu membantu serta mendorong penulis untuk mempercepat menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu ada saat penulis merasa jenuh serta memberikan motivasi dalam melakukan penulisan skripsi ini.
12. Teman-temanku Brilian, Fardana, Martin, Nanda, Rizky, Daniel Emerson, Adit, Aan, Reza, Ari, Yosua, Intan, Yagi, Feni, Yeneri, Mitra, Yogi, dan seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan seluruh Anggota Organisasi KAMUS Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, serta seluruh taman-temankuyang tidak biasa di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangaun untuk menyempurnakan skripsi ini kedepannya dimasa yang akan datang.

Semoga atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan dapat diberikan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT.

Bengkulu, Februari 2014

Muhammad Aziz Ridwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTOO dan PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Asumsi Dasar/Hipotesis	17
F. Keaslian Penelitian.....	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Populasi dan Sampel	21
5. Data Penelitian	23
6. Prosedur Pengumpulan Data	24

7. Pengolahan Data	25
8. Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Pengertian Surat Edaran	28
2. Tinjauan Mengenai Kejaksaan	31
3. Pengertian Upaya Hukum	39
4. Pengertian Tindak Pidana Khusus	48
5. Korupsi	51
BAB III Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia	
Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian	
Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kota Bengkulu	56
BAB IV Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat	
Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-	
003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan	
Perkara Tindak Pidana Khusus Khusus Di Kota Bengkulu	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR SINGKATAN

BKL	Bengkulu
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KASIPIDSUS	Kepala Seksi Pidana Khusus
KPA Kepala	Pengguna Anggaran
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	Mahkamah Agung
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
PIDSUS	Pidana Khusus
PIDUM	Pidana Umum
PN	Pengadilan Negeri
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	Pengadilan Tinggi
RAP	Rencana Anggaran Pelaksanaan
RENTUT	Rencana Tuntutan
SE	Surat Edaran
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Jaksa Pidana Khusus Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Dengan Jumlah Kasus Yang Harus Ditangani	76
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Provinsi Bengkulu.**
- 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.**
- 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Bengkulu.**
- 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.**
- 5. Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi.**
- 6. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.**
- 7. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.**

ABSTRAK

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus merupakan pedoman JPU dalam melaksanakan tugasnya. Namun tidak semua JPU menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Khusus. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Khusus Di Kota Bengkulu, serta untuk mengetahui hambatan dalam penerapan. Dari sumber data penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum, Sampel dalam penelitian ini adalah dua orang Jaksa tindak pidana khusus dan satu orang Kasipidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu, tiga orang Jaksa tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan satu orang kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa secara umum JPU sudah menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tetapi ada kasus tertentu yang tidak diterapkan oleh JPU dan bukan alasan jika JPU tidak menerapkan kasasi dengan mendasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena Pasal 253 ayat (1) KUHAP untuk putusan bebas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 67 KUHAP, Hambatan yang dihadapi oleh JPU adalah JPU tidak diberikan kewenangan yang mandiri, Jumlah Jaksa Pidsus sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani, JPU berbeda penafsiran tentang surat edaran yang berlaku, ketidak sinkronan antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain.

Kata kunci : Penerapan, Banding, Kasasi, Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum ini berarti bahwa setiap orang tidak dapat sewenang-wenangnya dalam melakukan sesuatu hal karena harus berlandaskan pada hukum, diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 .

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Di era reformasi, pasca perubahan atas UUD 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional.

Yang menjadi Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah “terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan social berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Misi Pembangunan Hukum Nasional.¹

Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang demokratis karena Negara Indonesia tidak mementingkan perseorangan tetapi

¹ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 1.

mementingkan kepentingan negara seperti yang tertuang didalam Pancasila dan UUD 1945 .

Keberadaan peraturan perundang-undangan memegang peranan sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.²

Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Pada dasarnya hukum diciptakan untuk ditegakkan dan dijalankan ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah untuk menegakkan asas "*equality before the law*" dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Sehingga tidak ada perbedaan pada setiap orang karena setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiantum*).³

Dalam hukum pidana terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan karena apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana.

“Penegakan hukum pidana meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum

² *Ibid*, Hal. 2.

³ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 14.

mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif dan administratif)”.⁴

Ketiga tahap tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi apabila dari salah satu tahap tersebut tidak berjalan maka tujuan dari undang-undang tersebut tidak akan tercapai karena dari ketiga tahap tersebut memiliki tujuan yang sama yakni menegakan hukum.

Pada umumnya semua undang-undang itu baik, tergantung penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang banyak menjadi sorotan di Indonesia pada saat ini adalah Jaksa. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

⁴ Aziz Syamsudin, *Op Cit*, Hal. 2-3.

⁵ Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, Hal 189.

Jaksa juga memiliki peranan penting dalam persidangan dan Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum didalam persidangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa juga bertindak atas nama negara.

Begitu juga dalam tugas dan wewenang Jaksa diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatan dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti Jaksa tidak dapat seenaknya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena tugas dan wewenang Jaksa telah di atur dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jadi Jaksa harus bertindak sesuai dengan isi Pasal 35 di atas .

Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindari norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggalai nilai-

nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai suatu tujuan dalam menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. Serta menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.⁷

Dikatakan demikian, adalah musatahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif.

Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Kejaksaan Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan tanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada Presiden.⁸

Pada saat ini banyak terdapat fenomena yang terjadi pada putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang sangat mencolok yang jauh dari tuntutan pemidanaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana khusus, karena dalam hal pidana penjara atau kurungan atau pidana denda yang ditetapkan dalam putusan hakim lebih ringan dari 2/3

⁶ *Ibid*, Hal. 204.

⁷ *Ibid*, Hal. 202.

⁸ *Ibid*, Hal. 204.

(dua pertiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum harus segera memohon menyatakan banding apabila putusan hakim lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga) dari Jaksa Penuntut Umum.

Salah satu tindak pidana khusus yang banyak menjadi sorotan adalah tindak pidana korupsi, tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah salah satu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara. Atau penyelewengan atau pengelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁹

Menurut Sayed Hussein Alatas yang dikutip dari buku Aziz Syamsuddin:

“Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.” (Chaerudin et.al.:2008).¹⁰

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁹ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, Hal.15.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 137.

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat.¹¹ Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan perkara yang biasa karena setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi telah jelas merugikan keuangan Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, apabila putusan hakim lebih rendah dibawah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding.

Perbedaan yang sangat mencolok antara putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi, yang jauh dari tuntutan pemedanaan Jaksa Penuntut Umum, seharusnya menjadi pengawasan tertentu bagi para aparatur Negara yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan prosedur atau dengan kata lain bertindak tidak berdasarkan undang-undang.

Salah satu putusan Hakim yang sangat mencolok terjadi pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang menjatuhkan putusan yang lebih rendah dibawah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

¹¹ Evi Haryanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1.

dimana pada kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi terhadap putusan hakim dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu. Sudah seharusnya apabila putusan hakim lebih rendah dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut umum harus menggunakan upaya hukum kasasi tetapi pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan upaya hukum kasasi. Salah putusan hakim lebih rendah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah:

Terdakwa Carby Simanjuntak berdasarkan surat Dakwaan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara: 21/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL pada pokoknya Tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 9 Agustus 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen sebagaimana dalam berkas perkara nomor urut satu romawi sampai dengan delapan belas romawi digunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Di dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mempunyai pendapat yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Carbi Simanjuntak, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Carbi Simanjuntak, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menempatkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dikembalikan penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;
8. Menetapkan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹²

Di dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mempunyai pendapat yang berbeda dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 12 September 2012, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Carbi Simanjuntak, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 12 September 2012 tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹³

Kewenangan yang diberikan Undang-undang pada Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga Jaksa dalam tugasnya sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kota Bengkulu.

Untuk mengetahui penerapan Jaksa Penuntut Umum dalam hal penuntutan dipersidangan sudah sesuai atau belum dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Kota Bengkulu, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Khusus Di Kota Bengkulu”.**

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 25/Pid.B/Tipikor/2012/PT.Bkl.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu ?
2. Apa hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu.
 - b. Untuk mengetahui hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang kewajiban Jaksa penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Secara Praktis, dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan untuk mengembangkan hukum Nasional dan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi Aparatur Negara dan Praktisi Hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Peranan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai lembaga pemerintahan pemerintahan yang terstruktur dalam susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan guna melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Soerjono Soekanto:

“Bahwa hukum dan penegakan hukum, merupakan sebagian fakta penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 KUHAP disebutkan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Lebih lanjutnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari penjelasan di atas bahwa Jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan yang begitu luas.

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* ditangan Penuntut Umum atau Jaksa.¹⁵ Ini artinya kekuasaan ada di tangan Jaksa Penuntut Umum dan hakim hanya menunggu penuntutan dari Penuntut Umum.

Secara filosofis, gambaran Jaksa/Penuntut Umum adalah figur yang professional, berintegritas dan disiplin. Jaksa harus berpedoman pada diktrin yang dinamakan *Tri Krama Adhyaksa* yaitu *Satya* : kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Op Cit*, Hal. 190.

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 16.

terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia; *Adhi* : kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia; *Wicaksana* : biJaksana dalam tuturkata dan tingkah laku khususnya dalam pengentrapan kekuasaan dan kewenangannya yang harus dipatuhi.

Doktrin *Tri Krama Adhyaksa* yang dijabarkan dalam kode etik Jaksa, sebagai tuntunan tata pikir, tata tutur dan tata laku dalam mewujudkan jati diri Jaksa mandiri memiliki kemampuan professional, integritas pribadi dan disiplin tinggi dalam mengemban bakti profesi kepada masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Asas yang harus dipegang teguh oleh Jaksa yaitu:

1. Asas legalitas (*legality*)

KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapannya harus bersumber pada titik tolak *the rule of law* yang berarti semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud kehidupan masyarakat di bawah supremasi hukum (*supremacy of law*) yang harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk di bawah ketentuan konstitusi undang-undang yang hidup di tengah kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka aparat penegak hukum dilarang atau tidak dibenarkan:

- a. Bertindak diluar ketentuan hukum (*undue to law*) maupun *undue process*.
- b. Bertindak sewenang-wenang (*abuse of law*).

2. Asas Keseimbangan (*Balance*)

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata-mata. Pelaksanaan KUHAP harus berdasarkan perlindungan terhadap

¹⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Loc Cit*, Hal. 190-191.

harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus menempatkan diri pada keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus menghindari perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak asasi manusia dan setiap saat harus sadar dan berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan masyarakat sejalan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi martabat manusia (*human dignity*) dan perlindungan individu (*individual protection*).¹⁷

Selanjutnya pada pelaksanaan penerapannya harus bersumber pada titik tolak *the rule of law* yang berarti semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum harus menegakkan hukum berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, adapun kutipan isinya sebagai berikut :

1. Dalam menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Putusan Hakim lebih rendah di bawah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Putusan hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana Mati
 - c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup.
 - d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut point 1 a,b,c tersebut di atas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi

¹⁷ <http://mahathir71.blogspot.com/2012/06/hukum-acara-pidana-dalam-teori-dan.html>. diakses pada hari rabu, 30 Oktober 2013, jam 21:13 Wib.

dapat dilakukan bila salah satu pihak sudah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa Agung Nomor : B-195/E.Efk/4/96 tanggal 7 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi.¹⁸

Pada saat ini banyak Jaksa yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang dimana salah satunya, yaitu Jaksa tidak melakukan banding atau kasasi, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, Jaksa Penuntut Umum harus sesegera mungkin meminta banding apabila putusan majelis hakim 2/3 dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini sesuai dengan surat edaran tersebut karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding.

Begitu juga yang terjadi pada kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Carbi Simanjuntak yang diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu, dimana tuntutan Jaksa penuntut Umum pada pengadilan Negeri adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.180.036.745,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu

¹⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.

tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan hanya dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, Sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum segera melakukan upaya hukum kasasi.

E. Asumsi Dasar Penelitian/Hipotesis

Asumsi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu menampilkan data untuk membuktikannya. Sehingga asumsi haruslah tepat sehingga seluruh hasil penelitian menjadi tepat sehingga tidak menimbulkan kesimpulan palsu.¹⁹

Sedangkan hipotesis adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dan apabila peneliti tidak memiliki opini atau dugaan jawaban permasalahannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesisnya.²⁰

Selanjutnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu hipotesis sebagai langkah dalam pemecahan masalah yang masih perlu dibuktikan untuk

¹⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 111.

²⁰ *Ibid*, Hal. 109-110.

membuktikan kebenarannya. Maka dari penjelasan di atas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Jaksa penuntut umum tidak menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.
2. Bahwa hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu pada kasus Carby Simanjuntak karena Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak mandiri atau independent.

F. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet, belum ditemukan penelitian yang mengkaji masalah Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu.

Adapun sebuah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah :

1. Peranan Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Kota Madiya Bengkulu

oleh Aminuddin, NPM. 8414014, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tahun 1989.

2. Proses pemeriksaan perkara pidana tingkat banding dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh Fatmawati, NPM. B1A96220028, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tahun 2000.
3. Upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (VRIJKSPAANK) di Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Umardhani NPM. B1A198028, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tahun 2003.
4. Upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas Pasal 244 KUHP oleh Lentiara Putri, NPM. B1A006019, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tahun 2010.

Dari keempat penelitian tersebut di atas jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena keempat penelitian di atas lebih menekankan pada tindak pidana umum sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah menekankan pada tindak pidana khusus sesuai dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain atau merupakan studi ilmu sosial yang *non doktrinal* dan bersifat empiris.²¹

Menurut Merry Yono :

“Penelitian hukum empiris diarahkan kepada studi terhadap hukum *law in action* (hukum sebagai fakta), karena bagaimanapun juga hukum akan berinteraksi dengan prantara-prantara social lainnya yang merupakan studi ilmu sosial yang *non doctrinal* yang mempunyai sifat empiris”²²

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum digunakan suatu pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 34

²² Merry Yono, 2002, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Unib, Bengkulu, Hal. 13.

Metode penelitian empiris ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.²³

“Makna dan konsep yang digunakan dalam kajian ini dapat pula tertangkap dengan menggunakan metode kualitatif (*Bogdan dan Taylor, 1975*). Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan (*Vredenburg, 1978*)”.²⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Bengkulu yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Kota Bengkulu.

Alasan objektif karena ada putusan Pengadilan di Kota Bengkulu di bawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Penuntut Umum tidak menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus dan subyek orang yang akan diwawancara berada di kota Bengkulu. Alasan subjektif yaitu untuk mengefisiensi waktu dan biaya penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²³ Andry Harijanto Hartiman, 2001, *Antropologi Hukum*, Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu, Hal. 23.

²⁴ Andry Harijanto Hartiman, dkk, 2008, *Buku Pedoman penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum, Bengkulu, Hal. 22-23.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁵ Dari pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Jaksa Penuntut Umum.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²⁶ Sampel dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya”.²⁷ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling* yaitu menggunakan cara *Purposive sampling*.

Metode *Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.²⁸ Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

²⁵ Bambang Sunggono, *Op Cit*, Hal.118.

²⁶ *Ibid*, Hal.119.

²⁷ Yandianto, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, Hal.518.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal. 51.

- a. Dua orang Jaksa pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.
- b. Satu orang Kasipidsus di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.
- c. Tiga orang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang tidak menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- d. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu

5. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer disebut juga sebagai data asli dan peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primair adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dimana data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal.²⁹

²⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, Hal. 678.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil Penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum.³⁰ Namun dapat diperoleh juga melalui studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, kamus, perundang-undangan, laporan hasil penelitian dan media massa seperti surat kabar yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis mengunakan teknik wawancara, teknik digunakan untuk mengetahui pendapat responden mengenai suatu hal, serta alasan-alasan yang mendasarinya. Pertanyaan harus dijawab dengan memberikan penjelasan yang mungkin singkat dan mungkin panjang. Dengan pengarahan dari peneliti, responden diminta untuk menjawab dengan memberikan jawaban se jelas mungkin.³¹

Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa teori-teori, pendapat-pendapat, serta pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok

³⁰ *Ibid*, Hal. 114.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal. 63.

permasalahan yang diteliti guna menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

7. Pengolahan Data

Setelah data dari penelitian kepustakaan dan lapangan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan cara editing data. Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya pada tahap editing data diseleksi atau diperiksa kembali karena untuk mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah lengkap atau belum , serta menambahkan data yang kurang maupun data yang keliru dan data disusun secara sistematis.

8. Analisis Data

Selanjutnya data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder lalu data tersebut dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, lalu diolah dalam bentuk analisis kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.³² Metode deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data-data yang bersifat khusus dan dengan kerangka berfikir induktif yaitu

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 10.

dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Kemudian menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Asumsi Dasar/Hipotesis
- F. Keaslian Penelitian
- G. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Lokasi Penelitian
 - 4. Populasi dan Sampel
 - 5. Data Penelitian
 - 6. Prosedur Pengumpulan Data

7. Pengolahan Data

8. Analisis Data

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 1

(Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/a/3A/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2

(Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/a/3A/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu).

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN dan SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Surat Edaran

Dalam berkomunikasi, manusia saling memberikan informasi. Pemberian informasi oleh manusia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan maupun tulisan. Informasi secara lisan terjadi jika pemberi informasi saling berhadapan baik langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara berbicara melalui telepon, radio, televisi, dan sebagainya. Namun jika tidak dapat berhadapan komunikasi dapat dilakukan melalui surat.

Surat dalam arti luas adalah informasi tertulis yg dapat digunakan sebagai alat komunikasi tertulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu yang khusus berlaku untuk surat menyurat. Sedangkan dalam arti sempit adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis.

Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak (orang, instansi, atau organisasi) kepada pihak lain (orang, instansi, atau organisasi).

Banyak terdapat jenis-jenis surat salah satunya adalah surat edaran, Yang dimaksud dengan surat edaran adalah pemberitahuan tertulis tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh orang banyak dan sifatnya

tidak rahasia. Surat edaran sering juga disebut surat sirkuler jika sasarannya banyak sekali. Surat edaran biasanya diterbitkan oleh suatu instansi atau oleh subjek surat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi yang ditujukan kepada kepala atau instansi yang berbeda di bawahnya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Isi surat edaran yang berasal dari suatu instansi pemerintah/ swasta dapat berupa suatu anjuran, larangan, pemberitahuan, petunjuk, dan sebagainya serta dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan lebih lanjut. Tujuan surat edaran yaitu untuk memberitahukan, mengajak, mengimbau untuk terlibat dalam peristiwa atau kegiatan yang akan diselenggarakan. Adapun surat edaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan perdagangan biasanya dipergunakan sebagai alat promosi barang-barang produk baru atau untuk kepentingan bisnis lainnya.³³

Secara garis besar Surat Edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat/pegawai.

Surat edaran ini berisi penjelasan mengenai sesuatu hal, misalnya kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan, atau suatu peraturan perundang-undangan.³⁴ Surat edaran juga berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak dan bersifat tidak rahasia.

Salah satu surat edaran yang ditujukan kepada pejabat/pegawai serta berfungsi untuk menyampaikan informasi yang ditujukan kepada kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia, adalah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan

³³ <http://dc428.4shared.com/doc/V7kz8GME/preview.html>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 00:01 Wib.

³⁴ http://fyastuti.blogspot.com/2012/10/surat-edaran_23.html, , diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 00:51 Wib.

Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, adapun isinya sebagai berikut, yaitu:

Berdasarkan rekomendasi dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 s/d 16 april 2002 dan hasil pengamatan berdasarkan laporan-laporan dari daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat atas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana khusus, perlu dilakukan upaya untuk percepatan penyelesaian perkara dimaksud.

Sehubungan hal tersebut mekanisme pengendalian penuntutan.

Perkara-perkara Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 april 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, perlu disesuaikan dan disempurnakan sepanjang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

A. TUNTUTAN PIDANA

1. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap.
 - a. Perkara Tindak Pidana penyulundupan yang nilai harganya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
 - b. Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Teritorial dan Pelanggaran Kepentingan Negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - d. Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala Nasional maupun Internasional karena hal tertentu sehingga pengadilan penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung.
2. a. Perkara Tindak Pidana Penyelundupan yang nilai harganya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendalian dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan yang nilai harganya dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari):
 - b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) sedangkan yang mengakibatkan kerugian Negara

dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).

B. UPAYA HUKUM

1. Dalam menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Putusan Hakim lebih rendah di bawah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Putusan hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana Mati
 - c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup.
 - d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut point 1 a,b,c tersebut di atas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak sudah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa Agung Nomor : B-195/E.Efk/4/96 tanggal 7 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang Nomor : 1 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
 2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi.
- C. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini , Hal-hal yang diatur di dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana sepanjang yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

2. Tinjauan Mengenai Kejaksaan

a. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan, sama halnya dengan aparat penegak hukum lainnya, baik dalam kualitas dalam sebuah obyek pembangunan, maupun sebagai subyek

yang berkarya dan mengarahkan hasil karyanya dibidang praktek hukum, pasti dan harus melaksanakan apa yang terdapat di dalam GBHN.³⁵

Jaksa bukan merupakan hal baru di Indonesia, kata Jaksa tersebut berasal dari bahasa Sansekerta “ *Adhyaksa*”, yang baik dahulu maupun sekarang tidak pernah tidak dihubugkan dengan bidang penegakan hukum, namun dalam hubungannya yang agak berbeda dengan masa kini.³⁶

Kata “*Adhyaksa*” dapat diartikan dengan berbagai arti, seperti: ³⁷

1. Superintendant atau Superintendece.
2. Pengawas dalam urusan kependetaa, baik agama budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana. Di samping itu juga bertugas sebagai hakim dan ia berada dibawah perintah serta pengawansan Mahapatih.
3. Di jaman V.O.C istilah adhyaksa diambil alih menjadi “*Jaxa*”, kemudian pada pemerintahan Hindia Belanda hal ini terlihat pada penempatan Jaksa di Bawah Residen atau Asisten Residen.
4. “Kata Jaksa berasal dari bahasa sansekerta, yang bebrarti superintendant yang berarti pengawas atau pengontrol yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”.

Dari arti kata yang diungkapkan di atas bahwa sejak dulu Jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan luas. Fungsinya senangtiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya dihubungkan dengan

³⁵ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 9.

³⁶ *Ibid*, Hal. 19.

³⁷ *Ibid*, Hal. 16.

bidang keagamaan.³⁸ Oleh sebab itu Jaksa harus selalu berpegang teguh sesuai dengan apa yang telah menjadi kewajibannya.

Dahulu, “*adhyaksa*” tidaklah sama tugasnya dengan tugas “penuntut Umum” dewasa ini. Lembaga Penuntut Umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti “*adhyaksa*” dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.³⁹

Menurut Van Vollenhoven, dalam buku Slamet Muljana, pada masa “kejawen” yaitu masa kerajaan mataram, semua pengadilan dipegang oleh bupati dan pejabat-pejabat pengadilan disebut “Jaksa”.⁴⁰ Oleh sebab itu pada masa kejayaan kerajaan mataram semua kekuasaan berada dibawah kewenangan bupati dan Jaksa.

Bahkan menurut Van Vollenhoven selanjutnya, semua perkara-perkara “pusadi” guna keluarga diadili oleh Jaksa yang mengetahui pengadilan dalam perkara “perdata”.⁴¹

Dari uraian di atas dapatlah diperoleh gambaran banding, bahwa Jaksa yang diambil alih dari “*adhyaksa*” ternyata hanyalah khas Indonesia. Tetapi, walaupun penamaannya mengandung kesamaan (bahkan kini digunakan dalam kepangkatan pada Kejaksaan), namun fungsi dan kedudukannya

³⁸ *Ibid*, Hal. 20.

³⁹ *Ibid*, Hal. 20.

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 21.

⁴¹ *Ibid*, Hal. 21.

berbeda.⁴² Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa sejak dulu Jaksa mempunyai kewenangan yang sangat luas, oleh sebab itu Jaksa harus selalu bertindak berdasarkan undang-undang agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan *eksekutif* (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan.⁴³

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa:

Jaksa Adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pada ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 6 KUHAP menegaskan bahwa:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan

⁴² *Ibid*, Hal. 22.

⁴³ Yesmil Anwar & Adang, *Op Cit*, Hal. 190.

sementara itu penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan tentang pengertian Jaksa Agung, yaitu:

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian Jaksa berhubungan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian Penuntut Umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan Jaksa Penuntut Umum secara lengkap yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hal. 24.

keadilan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁵

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 6 KUHAP disebutkan Bahwa:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Lebih lanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- a. Jaksa Adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Undang-Undang Kejaksaan juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

⁴⁵ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 213.

- a. Melakukan Penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Mencegah penyalahgunaan dan/atau penolakan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Menurut Djoko Prakoso:

Kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya selalu berhubungan dengan institusi lainnya. Kejaksaan dalam posisinya tergolong dalam kekuasaan eksekutif. Barangkali ini adalah sebagaimana terjadi pada masa Kerajaan Majapahit. Gajah Mada pada saat itu bertindak sebagai Jaksa Negara/Raja Jaksa yang bertugas sebagai tangan kanan raja yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang Raja.⁴⁶

Selanjutnya mengenai wewenang Jaksa Penuntut Umum diatur lebih

lanjut dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

yaitu:

⁴⁶ Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 87.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara persidangan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung juga mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatan dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian Upaya Hukum

Kata Upaya Hukum terdiri dari dua kata yaitu "upaya" dan "hukum", jika diterjemahkan secara harfiah, maka upaya hukum adalah usaha yang dilakukan berdasarkan hukum. Pengertian ini jika diperjelas lagi memiliki makna, upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan pengadilan melalui jalur hukum sebagaimana ditentukan caranya oleh undang-undang.

Apabila diperinci secara lebih intens, mendalam, dan mendetail, sebenarnya terhadap upaya hukum ini eksistensinya tumbuh, berkembang, dan terlaksana jika terdakwa/penuntut umum menolak putusan pengadilan atau putusan hakim (Pasal 1 angka 12 serta Pasal 196 ayat (3) huruf a, b, dan d KUHAP).⁴⁷

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka akan timbul pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian umum tentang upaya hukum (*rechtsmiddelen*). Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hal. 233.

Upaya hukum dimaksudkan sebagai hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dikutip oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan dalam buku lillik mulyadi, yaitu:

Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa merupakan Bab XVII, sedangkan upaya hukum luar biasa Bab XVIII.⁴⁹ Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.

a) Upaya Hukum Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 234 .

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal. 290.

dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Pada dasarnya upaya hukum banding diatur didalam Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 233-243 KUHAP, ketentuan Pasal 233 KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus di kuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
- 2) Hanya menerima banding sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP.
- 3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohonan serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal permohonan tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara pidana.
- 5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Sesuai asasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang

berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi.

1) Prosedur Mengajukan Permohonan Banding

Putusan Pengadilan Negeri dirasakan kurang memuaskan, maka pihak yang merasa kurang puas tersebut dapat menolak putusan Pengadilan dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Memori banding dibuat oleh Pembanding/mengajukan banding harus diajukan melalui panitera pengadilan negeri tempat perkara diajukan dengan jangka waktu yang tepat, atau dengan kata lain tidak boleh lebih dari 7 hari kerja, sejak putusan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Adapun prosedur dalam mengajukan banding, yaitu:

1. Meja 2 membuat :
 - a. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
 - b. Akta permintaan banding.
 - c. Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
 - d. Akta pencabutan banding.
2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
3. Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Dalam hal Pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh Pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
11. Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.⁵⁰

⁵⁰ <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-banding/pidana>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 22:24 Wib.

b) Upaya Hukum Kasasi

Pada dasarnya upaya hukum kasasi diatur di dalam Bab XVII bagian Kedua Pasal 244-258 KUHAP. Apabila ditinjau dari aspek historis yuridis, upaya hukum kasasi (*cassatie*) mula-mula merupakan lembaga yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari Prancis. Kata asalnya berasal dari perkataan “*casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan.⁵¹ Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang kemudian dibawa pula ke Indonesia. Sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.⁵² Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hal. 254.

⁵² Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal. 297.

duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

1) Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi

Terhadap alasan-alasan pengajuan permintaan kasasi dengan titik tolak aspek teoritis dan praktik maka pada pokoknya pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP guna menentukan:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁵³

2) Tenggang Waktu Mengajukan Kasasi

Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat(1) UU No. 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hal. 259.

3) Prosedur Mengajukan Permohonan Kasasi

Apabila banding putusan Pengadilan Negeri dirasakan kurang memuaskan, maka pihak yang merasa kurang puas tersebut dapat mengajukan kasasi. Kasasi diajukan jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon.

Adapun prosedur untuk mengajukan kasasi, yaitu:

1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa / Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.
2. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori / tambahan memori.
4. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasinya.
5. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi / kasasi kepada pihak lain, untuk itu petugas membuat tanda terima.
6. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.

7. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat akta.
8. Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005).
9. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.
10. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
11. Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik.
12. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa.
13. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
14. Untuk perkara kasasi yang terdakwa ditahan, Panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.
15. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, segera dikirim ke Mahkamah Agung.

16. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.⁵⁴

4. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara defenitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.⁵⁵ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum.⁵⁶

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku, akan tetapi berdasarkan Memori Penjelasan dari Pasal 103 KUHP, istilah Pidana Khusus dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.⁵⁷

⁵⁴ <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-kasasi/pidana>, diakses pada hari senin, 06 Januari 2014, Pukul 23:24 Wib.

⁵⁵ Aziz Syamsudin, *Op Cit.* Hal. 8.

⁵⁶ Evi Haryanti, *Op Cit.* Hal. 1.

⁵⁷ Aziz Syamsudin, *Op Cit.* Hal. 13.

Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.⁵⁸ Hukum Pidana Khusus juga sama halnya dengan Hukum Pidana Umum yakni berlaku untuk setiap orang yang berbuat melawan hukum tetapi perbedaannya adalah hukum pidana khusus lebih mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang berada diluar hukum pidana umum (KUHP).

Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidanapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.⁵⁹

Berdasarkan *asas lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi selama tidak ada ketentuan khusus berlakulah ketentuan umum itu.⁶⁰

Dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 8.

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 10.

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 11.

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Ini berarti dalam suatu tindak pidana berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti aturan pidana yang khusus mengenyampingkan aturan pidana yang umum. Ini berarti apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan. Kita ambil contohnya jika ada satu perbuatan yang masuk dalam ranah korupsi (penyuapan) misalnya maka yang dipakai bukan lagi pasal 209 dan 210 KUHP mengenai penyuapan akan tetapi undang-undang yang lebih khusus yaitu undang-undang tindak pidana korupsi.⁶¹

Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”

Ini berarti asas-asas umum dalam KUHP (ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP buku I) berlaku juga dalam Undang-undang khusus dalam hukum pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang khusus tersebut. Setiap Undang-Undang khusus dalam hukum pidana berlaku asas-asas yang ada dalam KUHP (buku I). Undang-Undang yang khusus ini biasanya dipelajari dalam tindak pidana khusus yang hanya mencakup aturan perundang-undangan yang khusus saja dalam hukum pidana. Misal UU tentang Tipikor, dan masih banyak lagi.⁶²

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang

⁶¹ <http://catkulsidqi.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-khusus-pertanyaan-dan.html>, diakses pada hari minggu, 05 Januari 2014, Pukul 15:28 Wib.

⁶² <http://catkulsidqi.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-khusus-pertanyaan-dan.html>, diakses pada hari minggu, 05 Januari 2014, Pukul 15:28 Wib.

lebih bersifat umum.⁶³ Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Hukum Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan.⁶⁴

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri diluar KUHP, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, dengan ancaman pidana penjaranya sangat berat 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup bahkan ada pidana mati (Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan Hidup).⁶⁵

5. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi, “korupsi” berasal dari latin *corrumpere* atau *corruptus* yang diambil dari kata *hafila* adalah penyimpangan dari kesucian (*profanity*),

⁶³ Aziz Syamsudin, *Loc Cit*, Hal. 11.

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 12.

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 9.

tindakan korupsi dikatakan perbuatan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujur, atau kecurangan.⁶⁶

Bahasa eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi dalam bahasa inggris yaitu, corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol.

Dari segi harfiah korupsi merupakan suatu perbuatan yang busuk, jahat dan merusak karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat moral dan keadaan yang busuk, penyelewengan jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁶⁷

Seperti sekarang ini berbagai Negara korupsi harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak, dan sering kali merupakan langkah awal yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Korupsi bukan hanya soal pejabat public yang menyalah gunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang, yang menyalahgunakan kedudukannya bila dengan demikian dapat memperoleh uang dengan mudah.

Secara sederhana, korupsi dapat didefenisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.⁶⁸

⁶⁶ <https://id-id.facebook.com/IrmanIvanKeseimbangan/posts/553892021307814>, , diakses pada hari minggu, 05 Januari 2014, Pukul 16:00 Wib.

⁶⁷ Evi Haryanti, *Op Cit*, Hal. 9.

⁶⁸ Jeremy Pope, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Hal. 6.

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah “penyelenggaraan atau pengelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi”.⁶⁹

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara. Atau penyelewengan atau pengelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁷⁰ Secara garis besar bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁶⁹ Yandianto, *Op Cit*, Hal. 284.

⁷⁰ Aziz Syamsudin, *Op Cit*. Hal.15.

Kata-kata yang dimaksud dengan “setiap orang” pada pengertian pasal di atas adalah bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan di atas maka orang tersebut dapat dipidana. Begitu juga yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada pengertian pasal di atas yaitu, suatu perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak ada diatur didalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan Negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

b. Unsur-unsur tindak pidana korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah:

Pasal 2 ayat (1), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang, termasuk korporasi.
- b) Melakukan perbuatan melawan hukum.
- c) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d) Merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara.

Pasal 3, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa pidana penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999).

BAB III

**Penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-
003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak
Pidana Khusus Di Kota Bengkulu**

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan undang-undang atau aturan yang ada. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Jaksa haruslah profesional dan proposional dengan selalu berpegang teguh pada hukum dan aturan Kejaksaan yang telah ada, sehingga penegakan hukumnya tidak melanggar undang-undang atau aturan yang ada. Jaksa penuntut umum adalah salah satu aparatur Negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dimana Jaksa Penuntut Umum harus bersifat kooperatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menjalankan tugas dan wewenangnya itu akan melanggar *Tri Krama Adhyaksa Adhi Wicaksana* karena seorang Jaksa adalah figur yang profesional, berintegritas dan disiplin, jadi seorang Jaksa dituntut dengan tata pikir, tata tutur dan tata laku dalam mewujudkan jati diri Jaksa mandiri memiliki kemampuan profesional, integritas

pribadi dan disiplin tinggi dalam mengemban bakti profesi kepada masyarakat, bangsa dan Negara serta harus memperhatikan keadilan bagi setiap orang.

Sesuai dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu, maka Jaksa harus menerapkan isi dari surat edaran tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangannya. Akan tetapi apabila kewenangan ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik oleh setiap Jaksa justru akan terjadi penyimpangan terhadap tugas dan wewenangannya. Dimana salah satu perintah dari surat edaran tersebut apabila terdakwa banding Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali putusan hakim lebih rendah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2014, Andhi Kurniawan selaku Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bengkulu, bahwa dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus, responden selalu menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 sesuai dengan perintah dari isi surat edaran tersebut dan menurut Jaksa Kejaksaan Negeri selalu menerapkan perintah dari isi Surat Edaran

tersebut, dimana apabila putusan hakim lebih rendah di bawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding atau kasasi. Menurut Andhi Kurniawan selaku Jaksa Pidsus dia selalu melakukan upaya hukum banding atau kasasi apabila putusan hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut umum. Karena surat edaran juga merupakan sebuah aturan, dimana aturan tersebut harus ditaati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya dan Jaksa tidak dapat bertindak sewenang-wenangnya dan harus berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya responden mengatakan bahwa tidak digunakan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Kota Bengkulu pada kasus Carby Simanjuntak, yaitu karena adanya Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi. Karena didalam Yurisprudensi tersebut terdapat alasan permohonan kasasi dan alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi.

Isi kutipan II Pelaksanaan angka 2 tentang Alasan permohonan kasasi dalam Yurisprudensi Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991, yaitu:

- a. Alasan menurut Ketentuan Undang-undang (Ps. 253 KUHP):
 - 1) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- 2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.
 - 3) Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
 - 4) Diluar ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP, menurut putusan MA Regno : 864 K/Pid/1986, apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut Ma menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan dengan PT, yakni terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.
- b. Alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi:
- 1) Bahwa putusan PT menguatkan putusan PN (Putusan MA Regno : 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983).
 - 2) Keberatan atas penilaian pembuktian (putusan MA Regno : 290 K/Pid/1983 tanggal 7 November 1983).
 - 3) Alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta (putusan MA Regno : 567 VPM 983 tanggal 10 November 1983).
 - 4) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara/irrelevant (putusan MA Regno : 7565 WPM 982 tanggal 8 Juni 1983).
 - 5) Alasan Kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman (putusan MA Regno : 797 K/Pida/1983 tanggal 11 November 1983).
 - 6) Keberatan kasasi atas permintaan pengembalian barang bukti (putusan MA Regno : 107 K/kr/1 977 tanggal 16 Oktober 1978).
 - 7) Permohonan kasasi yang didasarkan pada novum (putusan Ma Regno : 468 K/kr/1979 tanggal 18 Juni 1980).

Berdasarkan adanya Yurisprudensi tersebut maka responden berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Carby Simanjuntak tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi karena didalam Yurisprudensi di atas dijelaskan salah satu alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi adalah alasan kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman, oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi. Selain Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor :

B-321/E/Ept.3/4/1991 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Memori Kasasi di atas Jaksa Andhi Kurniawan juga menerangkan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi karena didalam huruf B. Upaya Hukum angka 2 surat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Khusus telah dijelaskan sebagai berikut :

“Permintaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi.”

Alasan yang dapat dijadikan untuk melakukan diajukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana khusus sesuai Surat Edaran Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002, yaitu dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi. Karena di dalam Surat Edaran Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 telah di jelaskan bahwa upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa, jadi menurut responden Jaksa Penuntut Umum yang manangani kasus Carby Simanjuntak tidak melakukan upaya hukum kasasi karena didalam putusan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi karena alasan yang boleh untuk melakukan upaya hukum kasasi yaitu dalam hal

putusan Hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi, sedangkan dalam kasus ini terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menurut responden, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut responden selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus, selain adanya Surat Edaran Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 yang menjadi alasan Jaksa kenapa tidak melakukan upaya hukum kasasi pada kasus Carby Simanjuntak, karena menurut Andhi Kurniawan Yurisprudensi juga mempunyai kekuatan hukum serta merupakan salah satu peraturan yang perlu ditaati dan diterapkan sesuai dengan isinya. Salah satu isi dari kutipan Yurisprudensi di atas yang tidak diperkenankan kasasi terdapat pada huruf B tentang alasan yang tidak diperkenankan untuk mengajukan kasasi angka 5 Yurisprudensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-321/E/Ept.3/4/1991 :

“Alasan Kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman”.

Berdasarkan Yurisprudensi di atas jika Jaksa Penuntut Umum hanya mempermasalahkan berat ringannya hukuman, itu bukan merupakan alasan yang diperkenankan untuk melakukan upaya hukum kasasi apabila suatu peraturan hukum sudah diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili sudah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya serta sudah sesuai dengan

Pasal 253 ayat (1) KUHP. Menurut responden Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi lagi karena peraturan hukum sudah diterapkan sebagaimana mestinya.

Halidimanjaya selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri saat diwawancari penulis pada tanggal 14 Januari 2014, mengatakan bahwa setiap Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena peraturan merupakan pedoman yang harus ditaati. Hal senada juga dijelaskan oleh Jaksa Halidimanjaya bahwa dia selaku Jaksa Pidsus selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002, bila putusan hakim dibawah 2/3 Jaksa Penuntut Umum maka sudah menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum banding, karena untuk melakukan upaya hukum kasasi dapat dilakukan apabila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding dan awalnya Jaksa Halidimanjaya tidak mengetahui adanya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus. Selanjutnya Jaksa Halidimanjaya memberikan keterangan bahwa di dalam menjalankan tugasnya Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan secara utuh karena Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai pelaksanaan di dalam persidangan akibat adanya pendelegasian dari pimpinan kepala Kejaksaan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dan kewenangan tetap ada ditangan pimpinan kepala Kejaksaan.

Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak karena terdapat mekanisme prosedural di dalam Kejaksaan dalam melakukan upaya hukum banding dan kasasi, dimana dalam setiap proses persidangan terdapat musyawarah dan pendapat dalam satu tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum juga harus melaporkan hasil musyawarah Jaksa tersebut kepada Kepala Seksi Pidana Khusus (KasiPidsus) untuk dikonsultasikan, dikoordinasikan dan untuk mendapatkan masukan dari pimpinan karena tugas kasipidsus salah satunya adalah sebagai koordinasi atau yang menjembatani antara Jaksa Penuntut umum dengan kepala pimpinan Kejaksaan, serta Kasipidsus menkoordinasi hasil musyawarah dari Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya kasipidsus akan melaporkan hasil musyawarah Jaksa Penuntut Umum yang telah dikoordinasi oleh kasipidsus kepada kepala Kejaksaan dan kepala Kejaksaan akan menagapinya serta akan memberikan masukan-masukan, tetapi dalam hal tersebut kewenangan ada ditangan pimpinan kepala Kejaksaan serta yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi adalah kepala Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai proses pendelegasian dari kepala Kejaksaan yang dikoordinasi oleh kasipidsus, jadi Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan secara mutlak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Ujang Suryana, yang menjabat sebagai KasiPidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu pada hari Rabu

tanggal 29 Januari 2014, berkaitan dengan penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus bahwa setiap Jaksa harus mengetahui serta menjalankan perintah dari isi surat edaran tersebut karena tidak ada alasan Jaksa tidak mengetahui setiap aturan yang ada karena surat edaran tersebut merupakan pedoman setiap Jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya karena Surat Edaran Jaksa Agung juga merupakan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Jaksa dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya sebagai pedoman Jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai Jaksa Penuntut Umum yaitu apabila putusan hakim dibawah 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa harus mengajukan banding karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan apabila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding.

Menurut responden seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang menagani kasus Carby Simanjuntak harus melakukan upaya hukum kasasi apabila putusan Hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena pada kasus ini terdakwa dituntut 6 tahun pidana penjara sedangkan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan selama 1 tahun pidana penjara, putusan hakim tersebut sudah jelas dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya apabila Jaksa Penuntut Umum bersifat jeli dan teliti serta berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan, Berdasarkan Surat Edaran

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 hal tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada karena putusan hakim dibawah 2/3. Menurut Ujang Suryana jika Jaksa Penuntut Umum berfikir kedepan demi keadilan masyarakat dan kepentingan umum maka alangkah lebih baiknya jika Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi karena terdakwa Carby Simanjuntak telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3.180.036.745,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tigapuluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan hanya diputus pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi selama 1 tahun pidana penjara. Tetapi menurut Ujang Suryana tidak dapat menyalahkan Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya karena didalam Kejaksaan terdapat pimpinan Kejaksaan yang berfungsi sebagai penanggung jawab serta mempunyai kewenangan yang utuh, dan Jaksa hanya sebagai pelaksana dari perintah pimpinan Kejaksaan.

Setelah mewawancarai kasipidsus dan Jaksa tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai dasar hukum, penulis juga mewawacarai Jaksa Penuntut Umum yang menagani kasus Carby Simantuntak di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yaitu terdiri dari 4 (empat) orang Jaksa Penuntut Umum yang mengani kasus Carby Simantuntak, diantaranya adalah Yeni Puspita, Ahlal Hudarahman, Abdul Rahman dan Nana Lukmana tetapi Jaksa Nana Lukmana sudah berpindah tugas dan tidak bertugas di Kejaksaan Tinggi

Bengkulu lagi jadi penulis hanya mewawancarai 3 (orang) Jaksa di atas, dimana yang diketuai oleh ibu Yeni Puspita.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 25 Februari 2014, menurut Yeni Puspita sebagai Jaksa Penuntut Umum bahwa Jaksa memiliki Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus yaitu Jaksa harus mentaati SOP tersebut. Didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus dijelaskan bila terdakwa banding Jaksa Penuntut Umum tidak harus banding kecuali dalam hal putusan hakim dibawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi apabila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding. Menurut Yeni Puspita bahwa responden sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menagani Carby Simanjuntak, tidak menggunakan upaya hukum kasasi karena didalam huruf B. Upaya Hukum angka 2 surat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Khusus telah dijelaskan sebagai berikut:

“Permintaan pemeriksaan upaya hukum Kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (1) KUHPA Yurisprudensi”

Menurut Jaksa Penuntut Umum upaya hukum kasasi bukanlah sebuah keharusan apabila putusan hakim telah memberikan rasa keadilan serta

peraturan hukum sudah diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili sudah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya maka Jaksa Penuntut Umum tidak harus melakukan Upaya hukum kasasi karena hal di atas telah terpenuhi dalam kasus Carby Simanjuntak kecuali apabila putusan hakim yang membebaskan terdakwa serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP Yurisprudensi. Putusan Hakim Kejaksaan Tinggi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, ini dianggap Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Menurut Yeni Puspita pidana penjara 1 (satu) tahun tersebut telah memenuhi rasa keadilan karena terdakwa juga berperilaku baik dalam persidangan dan terdakwa hanya berperan sebagai Kepala Pengguna Anggaran (KPA) dalam kasus tersebut serta terdakwa Carby Simanjuntak bukanlah satu-satunya terdakwa dalam kasus tersebut melainkan terdakwa yang banyak berperan dalam kasus ini adalah terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai kontaktor dalam kasus tersebut.

Terdakwa Carby Simanjuntak, yang berperan sebagai Kepala Pengguna Anggaran (KPA) dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki peran yang begitu penting karena terdakwa sebagai KPA hanya memantau hasil laporan dari bawahannya yang diberikan kepada KPA karena PPTK lah sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan bukan KPA, dan selagi

dokumen-dokumen yang diajukan kepada KPA itu lengkap maka KPA akan menyetujui apa yang diajukan kepada KPA, dan terdakwa sebagai KPA juga tidak pernah turun ke lapangan untuk mengecek bentuk fisik apakah sudah dilakukan sesuai dengan RAP dilapangan karena yang bertugas dilapangan bukanlah KPA dan tugas KPA hanya memantau dari berkas dokumen-dokumen yang ada jika sudah sesuai dengan mekanisme maka KPA akan menyetujuinya. Serta tugas terdakwa sebagai KPA sangatlah banyak dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa sebagai KPA tidaklah mungkin untuk datang ke seluruh Indonesia untuk mengecek pencairan dana tersebut serta terdakwa juga tidak mungkin mengecek langsung bentuk fisik satu persatu dilapangan oleh sebab itu hal tersebut yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Selain itu juga Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena apabila terdapat Surat Edaran yang bertentangan KUHAP maka yang dipakai sebagai pedoman adalah KUHAP, adapun Pasal 253 ayat

(1) KUHAP:

Permintaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Carby Simanjuntak, sudah memenuhi rasa keadilan, dan tidak terpenuhinya Pasal 253 ayat (1) KUHAP sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan upaya hukum kasasi dan tidak semua kasus memenuhi rasa keadilan hal ini dapat dilihat di dalam proses di Persidangan.

Responden juga mengatakan bahwa terdapat prosedur atau mekanisme dalam melakukan upaya hukum didalam Kejaksaan, dimana penentuan melakukan upaya hukum kasasi harus mengetahui Kasipidsus yang bertugas sebagai pengkoordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan kepala pimpinan Kejaksaan, dan dari situlah akan dilihat RENTUT perkara. Dari hasil rapat tersebut pertimbangan-pertimbangan akan di ambil dan penentuan dilakukan upaya hukum banding atau tidak tetap ada pada keputusan kepala pimpinan Kejasaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Chanifuddin Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 28 Februari 2014, bahwa setiap Jaksa wajib mengetahui serta menerapkan perintah dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus terutama Jaksa Pidsus, karena surat edaran tersebut merupakan petunjuk teknis dalam melaksanakan tuntutan perkara tindak pidana khusus jadi sudah kewajiban Jaksa untuk mengetahui serta menerapkan surat edaran tersebut. Selain itu juga di Kejaksaan terdapat buku pedoman seperti kumpulan Surat Edaran Jaksa

Agung yang dimiliki oleh Jaksa, hal ini dimaksudkan agar Jaksa memperhatikan serta bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan supaya Jaksa tidak bertindak sewenang-wenangnya. Responden juga menjelaskan bahwa dalam setiap tindakannya Jaksa Penuntut umum tidak dapat mengambil kewenangan secara sepihak karena setiap tindakan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum harus mengetahui serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan kepala Kejaksaan, ini dilakukan atas dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa. Dalam melaksanakan upaya hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat langsung mengajukan kasasi kepada Pengadilan tetapi Jaksa Penuntut Umum harus memberitahukan kepada kasipidsus agar kasipidsus memeriksa serta memberikan masukan apabila terdapat kesalahan didalam kasasi tersebut, kasipidsus juga sebagai koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan kepala pimpinan Kejaksaan. Menurut responden apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan kasasi kepala Kejaksaan juga akan memberikan masukan. Dalam hal ini kepala Kejaksaan menjelaskan bahwa tidak ada intervensi dari kepala Kejaksaan namun kewenangan tetap ada ditangan kepala Kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dianalisis oleh peneliti dapat diketahui penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus di Bengkulu bahwa secara umum Jaksa Penuntut Umum sudah menerapkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : SE-003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus tersebut tetapi ada kasus tertentu yang tidak diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terjadi pada kasus Carby Simanjuntak dimana pada kasus ini terdakwa di putus oleh 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi. Menurut penulis jika Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum kasasi dengan mendasarkan bahwa putusan hakim selama 1 tahun pidana penjara telah memenuhi rasa keadilan serta mendasarkan pada huruf B upaya hukum angka 2 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-003/A/JA/05/2002, karena dalam angka 2 tersebut dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum apabila terdakwa diputus bebas oleh hakim maka Jaksa Penuntut Umum agar menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan pada kasus Carby Simanjuntak hakim Pengadilan Negeri tidak memutus bebas melainkan diputus pidana Penjara 4 tahun. Ini telah dijelaskan dalam Pasal 67 KUHP, yaitu:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Jadi sudah seharusnya pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan upaya hukum kasasi. Selain itu didalam menggunakan upaya hukum kasasi terdapat mekanisme prosedur dalam Kejaksaan dimana Jaksa Penuntut Umum harus menyampaikannya kepada kasipidsus dan kasipidsus sebagai koordinasi

antara Jaksa Penuntut Umum dengan kepala pimpinan Kejaksaan dan keputusan dilakukanya Kasasi atau tidak ada ditangan kepala pimpinan Kejaksaan.